



WALI KOTA BATAM
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN WALI KOTA BATAM
NOMOR **167** TAHUN 2024

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA BATAM,

Menimbang : bahwa sesuai ketentuan Pasal 123 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dengan berpedoman pada Peraturan Wali Kota Batam Nomor 82 Tahun 2024 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kota Batam Tahun 2024, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024;

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang. . .

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Presiden Nomor 134 Tahun 2022 tentang Pemutakhiran Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 242);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Peraturan. . .

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan dan Pembangunan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447), sebagaimana telah dimutakhirkan beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang perubahan Atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 81 Tahun 2022 tentang Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 590);
11. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7);
12. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2019 Nomor 7).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA BATAM TENTANG PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH SATUAN POLISI PAMONG PRAJA TAHUN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Batam.
2. Wali Kota adalah Wali Kota Batam.

3. Rencana. . .

3. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut Renja Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan program dan kegiatan Perangkat Daerah untuk kurun waktu 1 (satu) tahun.
4. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah.
5. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA-Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB II PERUBAHAN RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH

Pasal 2

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan penjabaran Rencana Strategis Perangkat Daerah, Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Kota Batam Tahun 2024, kondisi lingkungan strategis Daerah dan hasil evaluasi Rencana Kerja Perangkat Daerah Triwulan II tahun berjalan.
- (2) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. BAB I. PENDAHULUAN;
 - b. BAB II. HASIL EVALUASI SAMPAI DENGAN TRIWULAN II;
 - c. BAB III. RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH;
 - d. BAB IV. PENUTUP.
- (3) Perubahan Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah Tahun 2024 merupakan bagian dari Perubahan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3. . .

Pasal 3

- (1) Perubahan Renja Perangkat Daerah Tahun 2024 menguraikan program, kegiatan, sub kegiatan, indikator kinerja, target capaian kinerja, dan pagu indikatif.
- (2) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman Perangkat Daerah dalam menyusun perubahan RKA Perangkat Daerah.
- (3) Perubahan Rencana Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 4

Peraturan Wali Kota ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar. . .

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Batam.

Ditetapkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

WALI KOTA BATAM



MUHAMMAD RUDI

Diundangkan di Batam
pada tanggal 5 Agustus 2024

SEKRETARIS DAERAH KOTA BATAM



JEFRIDIN

BERITA DAERAH KOTA BATAM TAHUN 2024 NOMOR 1507



PERUBAHAN RENCANA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA 2024



PEMERINTAH KOTA BATAM
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
2024

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas rahmat-Nya sehingga kami dapat menyelesaikan penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 ini.

Renja adalah dokumen perencanaan Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam untuk periode 1 (satu) tahun. Renja memuat program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan RKPD sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja ini dimaksudkan untuk memberikan arah sekaligus pedoman bagi seluruh jajaran pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024.

Semoga Perubahan Rencana Kerja (Renja) ini dapat dipedomani oleh seluruh pejabat dan staf di lingkungan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat guna menyukseskan visi dan misi Pemerintah Kota Batam.

Batam, 26 Juli 2024

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Kota Batam




Imam Tohari, S.H., M.H
Pembina Tk I (IV/b)
NIP. 19730510 200701 1 033

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN.....1

 1.1 Latar Belakang.....1

 1.2 Landasan Hukum3

 1.3 Maksud dan Tujuan.....6

 1.4 Sistematika Penulisan6

BAB II EVALUASI RENJA SATPOL PP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024.....8

 2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Batam Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024.....8

 2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam21

 2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam25

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH31

BAB IV PENUTUP52

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra s/d Tahun 2024.....	10
Tabel 2.2	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sampai dengan triwulan II.....	22
Tabel 2.3	Capaian Kinerja Penyelesaian Gangguan Trantibum, dan Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2023.....	25
Tabel 2.4	Identifikasi Permasalahan Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam.....	26
Tabel 3.1	Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 Sebelum dan Sesudah.....	32
Tabel 3.2	Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Hasil Inputan SIPD RI)....	42

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

1.1.1 Pengertian Perubahan Renja

Perubahan RKPD dan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dapat dilakukan apabila berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaannya dalam tahun berjalan menunjukkan adanya ketidaksesuaian dengan perkembangan keadaan yang meliputi Perubahan :

- a. Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan Daerah, kerangka ekonomi Daerah dan keuangan Daerah, rencana program dan kegiatan RKPD berkenaan; dan/atau
- b. Keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan
- c. penambahan dan/atau pengurangan program dan kegiatan perangkat Daerah.

Adapun perubahan terhadap dokumen perencanaan dapat dilakukan apabila memenuhi persyaratan yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah

Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam harus menyesuaikan dengan dokumen perubahan RKPD menjadi dokumen Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Perubahan renja juga harus menyesuaikan dengan Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam. Selanjutnya Perubahan Renja dijadikan sebagai pedoman penyusunan Kebijakan Umum Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (KUA-P) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (PPAS-P), Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKA-P) yang kemudian menjadi Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPA-P) melalui penetapan APBD Perubahan (APBD-P).

1.1.2 Proses Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah

Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah merupakan wujud pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah dilakukan

setelah Perangkat Daerah menerima surat edaran Kepala Daerah tentang Pedoman Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah. Penyusunan Perubahan Renja Perangkat Daerah berpedoman pada :

- a. Rancangan Perubahan RKPD; dan
- b. Hasil Pengendalian Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota sampai dengan Triwulan II Tahun berkenaan.

Penyusunan Perubahan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sebagaimana dimaksud dalam pasal 360 ayat (3) Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 terdiri atas :

- a. Perumusan Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah; dan
- b. Penyajian Rancangan Perubahan Renja Perangkat Daerah.

Perubahan Renja Perangkat Daerah memuat kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Program dan kegiatan dimaksud meliputi program dan kegiatan yang sedang berjalan, kegiatan alternatif atau baru, indikator kinerja, dan kelompok sasaran yang menjadi bahan utama RKPD, serta menunjukkan prakiraan maju.

1.1.3 Keterkaitan Antara Renja Perangkat Daerah dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Renja Perangkat Daerah sebagai dokumen perencanaan tahunan harus disusun dengan berpedoman pada dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan pembangunan tahunan Pemerintah Daerah, dan berpedoman pada Renstra Perangkat Daerah, yang merupakan dokumen perencanaan 5 (lima) tahunan. Renstra Perangkat Daerah disusun dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD, yang merupakan dokumen perencanaan 5 tahunan daerah. Selanjutnya Renja Perangkat Daerah menjadi pedoman dalam Menyusun RKA sebelum ditetapkan menjadi APBD.

1.2 Landasan Hukum

Landasan hukum penyusunan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah sebagai berikut:

- a. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- c. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- d. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
- e. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6056);
- f. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
- g. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 tentang Satuan Polisi Pamong Praja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6205);
- h. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

- i. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instransi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
- j. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
- k. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- l. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 158);
- m. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2019 tentang Pemenuhan Hak Pegawai Negeri Sipil, Penyediaan Sarana dan Prasarana Minimal, Pembinaan Teknis Operasional dan Penghargaan Satuan Polisi Pamong Praja (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 550);
- n. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
- o. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
- p. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
- q. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Dalam Negeri Tahun 2020-2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 892);

- r. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
- s. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
- t. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- u. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 2 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2005-2025 (Lembar Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2009 Nomor 2);
- v. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah RPJMD Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2021 Nomor 54);
- w. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 2 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Batam Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2013 Nomor 2);
- x. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 1);
- y. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Batam Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 3);
- z. Peraturan Daerah Kota Batam Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 127);
- aa. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 78 Tahun 2021 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2021 Nomor 864);

- bb. Peraturan Walikota Batam Nomor 214 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 1082);
- cc. Peraturan Wali Kota Batam Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tugas Pokok, Fungsi dan Uraian Tugas Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2022 Nomor 886);
- dd. Peraturan Walikota Batam No 65 Tahun 2023 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2023 Nomor 1192);
- ee. Peraturan Walikota Batam No 84 Tahun 2024 Tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah RKPD Kota Batam Tahun 2024 (Berita Daerah Kota Batam Tahun 2024 Nomor 1424).

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud dari penyusunan Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk memberikan gambaran program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam, yang disusun berpedoman kepada Renstra dan RKPD.

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 adalah untuk :

- a. Sebagai landasan penyusunan KUPA dan PPAS Perubahan Tahun 2024 dalam rangka penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja pada OPD.
- b. Menjabarkan rencana strategis ke dalam rencana operasional.
- c. Memelihara konsistensi antara capaian tujuan perencanaan strategis jangka menengah dengan tujuan perencanaan dan penganggaran tahunan.
- d. Mengukur kinerja penyelenggaraan fungsi melalui capaian target kinerja program dan kegiatan.
- e. Sebagai bahan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 adalah:

BAB I PENDAHULUAN

Memuat latar belakang, yaitu pengertian Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, proses penyusunan Rencana Kerja (Renja), keterkaitan Rencana

Kerja (Renja) dengan dokumen perencanaan lainnya, landasan hukum, maksud dan tujuan dan sistematika penulisan.

BAB II EVALUASI RENJA SATPOL PP DENGAN TRIWULAN II (TAHUN BERJALAN)

Memuat evaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja sampai dengan triwulan II Tahun 2024 dan capaian Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah, analisis kinerja pelayanan Perangkat Daerah, isu-isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi Perangkat Daerah.

BAB III RENCANA KERJA DAN PENDANAAN SATPOL PP

Memuat Perubahan Rencana Kerja (Renja) dan pendanaan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024

BAB IV PENUTUP

BAB II

EVALUASI RENJA SATPOL PP SAMPAI DENGAN TRIWULAN II TAHUN 2024

2.1 Hasil Evaluasi Pelaksanaan Renja Satpol PP Kota Batam Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024

Pada Rencana Kerja 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merencanakan 2 (dua) Program 9 (Sembilan) Kegiatan dan 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan. Dari 31 (tiga puluh satu) Sub Kegiatan ada 5 sub kegiatan yang tidak diakomodir di DPA 2024, untuk realisasi Fisik dan Keuangan Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 sebesar 53.18%.

Pada perubahan Rencana Kerja (Renja) tahun 2024, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam merencanakan 2 (dua) program dan 9 (sembilan) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan, yaitu:

- a. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota
 - 1) Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:
 - a) Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN;
 - b) Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD.
 - 2) Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah;
 - a) Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya.
 - 3) Administrasi Umum Perangkat Daerah:
 - a) Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor;
 - b) Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor;
 - c) Penyediaan Bahan Logistik Kantor;
 - d) Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan;
 - e) Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan;
 - f) Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD.
 - 4) Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah;
 - a) Pengadaan Mebel
 - b) Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - 5) Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik;
 - b) Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.
- 6) Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:
 - a) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan;
 - b) Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan;
 - c) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya;
 - d) Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya;
- b. Program Peningkatan Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 1. Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:
 - a) Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat Dalam Rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum.
 - b) Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraaja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia;
 - c) Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan;
 - d) Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa;
 - e) Penyediaan Layanan Dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada.
 - f) Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum
 - 2. Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota:
 - a) Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota
 - b) Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota.
 - c) Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota;
 - 3. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota:
 - a) Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Berikut ini disajikan evaluasi hasil pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sampai dengan triwulan II Tahun 2024 pencapaian Renstra:

Tabel 2.1

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dan Pencapaian Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam s/d Tahun 2024

Kota Batam

Nama Perangkat Daerah: Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n)			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR															
1.05	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM															
01.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%			100%	100%	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n)			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
1.05.01.2.02	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	41.67%	41.67%	100%	100%	100%
1.05.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	195 Orang/Bulan	207 Orang/Bulan	197 Orang/Bulan	194 Orang/Bulan	98.48%	199 Orang/Bulan	188 Orang/Bulan	94.47%	189 Orang/Bulan	182 Orang/Bulan	96.30%	189 Orang/Bulan	182 Orang/Bulan	96.30%
1.05.01.2.02.03	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	300 Dokumen	22 Dokumen	27 Dokumen	27 Dokumen	100%	276 Dokumen	276 Dokumen	100%	324 Dokumen	-	0	0	0	0
1.05.01.2.05	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%				100%			100%	-	0	100	-	0
1.05.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	-	-	2 Paket	-	0	2 Paket	-	0
1.05.01.2.06	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	100%			100%			100%	89.47%	89.47%	100%	89.47%	89.47%
1.05.01.2.06.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	2 Paket	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%	1 Paket	1 Paket	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n)			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
1.05.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	7 Paket	6 Paket	85.71%	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	100%	7 Paket	7 Paket	100%
1.05.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	4 Paket	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	2 Paket	66.67%	3 Paket	2 Paket	66.67%
1.05.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	2 Paket	2 Paket	2 Paket	2 Paket	100%	2 Paket	2 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%	3 Paket	3 Paket	100%
1.05.01.2.06.06	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	4 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	1 Dokumen	1 Dokumen	100%
1.05.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	1 Laporan	13 Laporan	11 Laporan	84.61%	4 Laporan	3 Laporan	75%	4 Laporan	2 Laporan	50%	4 Laporan	2 Laporan	50%
1.05.01.2.07	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%			100%			100%	21.74%	21.74%	100%	21.74%	21.74%
1.05.01.2.07.2	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	2 Unit	-	-	-	-	2 Unit	-	0	-	0	0	0	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n)			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
1.05.01.2.07.05	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket mebel yang Disediakan	5 Paket	3 Paket	-	-	-	4 unit	-	0	4 Unit	-	0	4 Unit	-	0
1.05.01.2.07.06	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	6 Unit	9 Paket	8 Unit	8 Unit	100%	6 Unit	4 Unit	66.67%	68 Unit	5	7.35%	68 Unit	5	7.35%
1.05.01.2.08	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	100%			100%			100%	41.67%	41.67%	100%	41.67%	41.67%
1.05.01.2.08.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12 laporan	4 Paket	12 laporan	12 laporan	100%	38 Laporan	38 Laporan	100%	37 Laporan	16 Laporan	43.24%	37 Laporan	16 Laporan	43.24%
1.05.01.2.08.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	442 Orang	12 laporan	12 laporan	100%	72 Laporan	72 Laporan	100%	72 Laporan	30 Laporan	41.67%	72 Laporan	30 Laporan	41.67%
1.05.01.2.09	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	100%	100%			100%			100%	37.84%	37.84%	100%	37.84%	37.84%
1.05.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan	2 Unit	2 Unit	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	2 unit	100%	2 Unit	2 unit	100%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n)			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
	Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Dibayarkan Pajaknya														
1.05.01.2.09.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan Dibayarkan Pajak dan Perizinannya	20 Unit	20 Unit	20 Unit	20 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%	11 Unit	11 Unit	100%
1.05.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	70 Unit	47 Unit	35 Unit	32 Unit	91.42%	35 Unit	35 Unit	100%	77 Unit	-	0	77 Unit	-	0
1.05.01.2.09.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	4 Unit	3 Unit	1 Unit	1 Unit	100%	2 Unit	2 Unit	100%	2 Unit	1	50%	2 Unit	1	50%
1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1. Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100%		100%			100%			100	100	100	100	100	100
		2. Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100%	100%	100%			100%			100%	0	0	100%	0	0
		3. Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%	100%			100%			100%	0	0	100%	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n)			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
1.05.02.2.01	Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	1.Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani	100%		100%			100%	0		100%			100%		
		2. Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	100%		100%			100%	0		100%			100%		
		3.Persentase Polisi Pamong Praja yang memenuhi standard kualifikasi	100%	40%	51%			61%			75%	59.34%	79.12%	61%		
		4.Warga Negara yang memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Treantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	4 Orang	-	4 Orang			4 Orang			4 Orang	0	0	4 Orang	-	0
		5.Persentase Jenis Sarpras Trantibum yang terpenuhi sesuai kebutuhan.	100%	-	100%	100%	100%	100%			100%	88.89%	88.89%	100	88.89%	88.89%
1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Jumlah Dokumen hasil pelaksanaan koordinasi penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum dan perlindungan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-	-	-	-	1 Dokumen	-	-

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n)			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
	Tingkat Kabupaten/Kota	masyarakat tingkat kabupaten dan kota														
1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka ketentraman dan ketertiban umum	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	1 Dokumen	100%	6 Dokumen	-	0	5 Dokumen	1 Dokumen	20.%	5 Dokumen	2 Dokumen	40.%
1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Polisi Pamong Praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	26 Orang	-	18 Orang	18 Orang	100%	30 Orang	15 Orang	50%	42 Orang	-	0%	90 Orang	33 Orang	36.67%
1.05.02.2.01.0006	Kerjasama Antar Lembaga dan Kemitraan dalm Teknik Pencegahan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan	1 Dokumen	-	-	-	-	1 Dokumen	-	0	-	-	0	1 Dokumen	-	0
1.05.02.2..01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat yang telah di buat dan	-	-	-	-	-	0 Dokumen	-	0	-	-	0	-	-	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n)			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
		dimutakhirkan														
1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan dan Pengawasan	100 Kasus	-	24 Kasus	24 Kasus	100%	100 Kasus	100 Laporan	100%	100 Laporan	25 Laporan	25%	224 Laporan	149 Laporan	66.07%
1.05.02.2.01.0016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Kasus Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	30 Kasus	7 Kasus	21 Kasus	21 Kasus	100%	19 Kasus	34 Laporan	178.95%	54 Laporan	1 Laporan	1.85%	101	56	55.45%
1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Perda dan Perkada	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani	1 Laporan	-	1 Laporan	1 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	4 Laporan	-	0	4 Laporan	-	0
1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	15 Unit	-	-	-	-	9 Unit	8 Unit	88.89%	9 Unit	8 Unit	88.89%	9 Unit	8 Unit	88.89%

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n)			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
1.05.02.2.02	Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang Ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100	99.60	99.60	100		
1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Perda/Perkada kepada Masyarakat /Kelompok Masyarakat/Pelaku Usaha	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	12 Laporan	100%	12 Laporan	-	0	11 Laporan	-	0	47 Laporan	24 Laporan	51.06%
1.05.02.2.02.0011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur yang Dapat Ditangani Sesuai SOP	6 Laporan	6 Laporan	9 Laporan	9 Laporan	100%	6 Laporan	6 Laporan	100%	12 Laporan	-	0	33 Laporan	21 Laporan	63.64%
1.05.02.2.02.0012	Pengawasan atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	30 Laporan	87 Laporan	20 Laporan	20 Laporan	100%	22 Laporan	22 Laporan	100%	30 Laporan	8 Laporan	26.67%	159 Laporan	137 Laporan	86.16%
1.05.02.2.03	Kegiatan Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS)	Rasio PPNS Satpol PP	8.72%	3,40%	4,37%	4,37%	100%	5.64%	5.64%	100%	6.31%	0	0	6.31%	0	0

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcomes)/Kegiatan (output)	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2021-2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d Tahun 2021 (n-3)	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2022 (n-2)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu 2023 (n-1)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n)			Target Program dan Kegiatan s.d. Tahun Berjalan 2024	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d Tahun Berjalan 2024	
					Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Tingkat Realisasi (%)		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d Tahun berjalan (Tahun n-1)	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8=7/6	9	10	11	12	13	14=13/12	15	16	17=16/15
	Kabupaten/Kota															
1.05.02.2.03.01	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Dalam Mendukung Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat serta Penegakan Perda dan Perkada	3 Laporan	-	2 Laporan	2 Laporan	100%	1 Laporan	1 Laporan	100%	3 Laporan	-	0	6 Laporan	3 Laporan	50%

Sampai dengan Triwulan II Tahun 2024, dari 2 (dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan, dan 27 (dua puluh tujuh) sub kegiatan yang tertuang dalam DPA, 20 (dua puluh) sub kegiatan telah dilaksanakan, dan 7 sub kegiatan belum dilaksanakan, dengan capaian sebagaimana disajikan dalam tabel di atas.

Sub Kegiatan yang belum dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam adalah :

1. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel
2. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Sub Kegiatan Penyediaan Layanan dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada
4. Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
5. Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota
6. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS.

Sub Kegiatan Pengadaan Mebel, Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Sub Kegiatan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Walikota, Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota belum ada realisasi keuangannya, namun untuk fisiknya sudah 50 persen. Sedangkan Sub Kegiatan Penyediaan Layanan Dalam Rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perkada sampai triwulan II (dua) ini tidak ada yang terkena dampak akibat sub kegiatan dari Penindakan atas gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penangan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa (Penertiban) yang dilakukan di Kota Batam. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS sedang proses pelaksanaannya di Bogor Megamendung yang di ikutin oleh Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Bapak Imam Tohari, S.H.M.H. Selain itu, ada Sub kegiatan yang Di satukan Rekening anggarannya, yaitu Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Ke dalam Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dan Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor.

Di Dalam Perubahan Anggaran Tahun 2024 ada Beberapa Sub Kegiatan Yang bertambah Anggarannya, diantaranya :

1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN
2. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
3. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
5. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak

Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan

6. Sub Kegiatan Dinas Jabatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
7. Sub Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
8. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
9. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan
10. Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa
11. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum

2.2 Analisis Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

Untuk melaksanakan urusan wajib bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, dalam Renstra Tahun 2021-2026 Satuan Polisi Pamong Praja merencanakan 2 (dua program) yaitu Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota, dan Program Peningkatan Ketentraman dan Ketertiban Umum.

Berikut ini adalah pencapaian kinerja pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 :

Tabel 2.2
Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Sampai dengan Triwulan II
Kota Batam

Berikut ini adalah Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam sampai dengan Triwulan II Tahun 2024 :

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun n-1	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun n-1	TW II	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
1.	Persentase penurunan pelanggaran Ketenteraman dan Ketertiban Umum dan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12.50%	14.30%	16.70%	20%	11.28%	13.19%	56.54%	16.68%	19.92%	
2.	Indeks Kepuasan terhadap Layanan Kesekretariatan			82	84	86	88	80	83.73	86.06	88	90	

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun n-1	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun n-1	TW II	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
3.	Persentase penurunan pelanggaran Trantibum			12.50%	14.30%	16.70%	20%	11.61%	13.59%	48.13%	16.67%	20%	
4.	Persentase penurunan pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah			12.50%	14.30%	16.70%	20%	11.15%	12.90%	62.58%	16.69%	19.87%	
5.	Persentase terpenuhinya penunjang urusan pemerintahan daerah			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
6.	Persentase gangguan Trantibum yang dapat		Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

No	Indikator Kinerja	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah				Realisasi Capaian			Proyeksi		Catatan Analisis
				Tahun (n-2)	Tahun n-1	Tahun (n)	Tahun (n+1)	Tahun (n-2)	Tahun n-1	TW II	Tahun (n)	Tahun (n+1)	
				2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2024	2025	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	diselesaikan												
7.	Persentase Penegakan Perda dan Perkada		Persentase Perda dan Perkada yang ditegakkan	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	
8.	Persentase warga Negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada	Jumlah Warga Negara yang memperoleh layanan akibat dari penegakan hukum perda dan perkada Kabupaten/Kota		100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	

Dari tabel capaian kinerja yang disajikan di atas, dapat dilihat bahwa realisasi dari semua indikator kinerja mencapai 100%. Dengan demikian capaian kinerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2024 sangat baik.

2.3 Isu-isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

2.3.1 Tingkat Kinerja Perangkat Daerah

Dalam Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam 2021-2026, indikator kinerja program yang ditetapkan adalah:

- 1) Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan, dengan rumus perhitungan:

$$\frac{\text{Jumlah gangguan Trantibum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah gangguan Trantibum yang dilaporkan Masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

- 2) Persentase Penegakan Perda dan Perkada, dengan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah Pelanggaran Perda dan Perkada yang diselesaikan}}{\text{Jumlah pelanggaran Perda dan perkada yang dilaporkan masyarakat dan teridentifikasi oleh Satpol PP}} \times 100\%$$

- 3) Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada dengan rumus perhitungan :

$$\frac{\text{Jumlah warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada}}{\text{Jumlah warga negara yang terkena dampak akibat penegakan Perda dan Perkada}} \times 100\%$$

Capaian kinerja penyelesaian gangguan Trantibum, penegakan Perda dan Perkada, dan layanan terkena dampak gangguan Trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran Perda dan Perkada tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Capaian Kinerja Penyelesaian Gangguan Trantibum, dan Pelanggaran Perda dan Perkada Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus yang Selesai	Realisasi
1	2	3	4	5	6
1	Persentase gangguan Trantibum yang dapat diselesaikan	100%	534	534	100%
2	Persentase penegakan Perda dan Perkada	100%	743	743	100%
3	Persentase warga negara yang memperoleh layanan terkena dampak gangguan trantibum akibat penegakan hukum terhadap pelanggaran	100%	4	4	100%

No	Indikator Kinerja	Target	Jumlah Kasus	Jumlah Kasus yang Selesai	Realisasi
1	2	3	4	5	6
	Perda dan Perkada				

2.3.2. Permasalahan dan Hambatan

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan bagi Kota Batam.

Sebagai Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya tentu saja ditemukan masalah-masalah yang dapat menghambat pencapaian kinerja. Beberapa permasalahan umum yang dapat diidentifikasi oleh Satpol PP Kota Batam terkait pelaksanaan tugas dan fungsinya adalah sebagai berikut:

Tabel 2.4
Identifikasi Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Masih tingginya pelanggaran ketentraman dan ketertiban umum	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kententraman dan ketertiban umum	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang
			2. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial
2	Masih tingginya pelanggaran terhadap peraturan daerah	Kurangnya kesadaran masyarakat untuk menjaga kententraman dan ketertiban umum Penegakan terhadap pelanggaran peraturan daerah masih kurang	1. Pemahaman masyarakat terhadap peraturan-peraturan daerah masih kurang
			2. Kesulitan ekonomi dan kesejahteraan sosial

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
(1)	(2)	(3)	(4)
3	Gangguan ketentraman dan ketertiban di lingkungan masyarakat tinggi	Penerapan sistem keamananan lingkungan masih kurang	Jumlah Linmas masih sedikit dan kurang diberdayakan
4	Belum maksimalnya pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Satuan Polisi Pamong Praja	1. Kualitas SDM aparaturnya masih kurang 2. Sarana dan prasarana masih terbatas	Alokasi anggaran pengembangan SDM dan peningkatan sarana dan prasarana terbatas

Sumber: Hasil analisis

Permasalahan umum Kota Batam adalah tingginya pelanggaran yang dilakukan oleh masyarakat terhadap peraturan perundangan, dan untuk urusan Trantibum, gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda juga cukup tinggi. Pelanggaran-pelanggaran itu disebabkan oleh rendahnya kesadaran masyarakat untuk menaati Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang ada di Kota Batam. Tingginya gangguan dan pelanggaran Trantibum dan Perda berakar dari rendahnya pemahaman masyarakat terhadap Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah yang berlaku di Kota Batam. Selain itu kualitas SDM aparaturnya juga berperan terhadap penegakan gangguan dan Pelanggaran Trantibum dan Perda/Perkada.

Dalam hal perlindungan masyarakat, jumlah satlinmas yang ada saat ini belum terpenuhi secara maksimal sebagaimana diatur dalam Permendagri Nomor 26 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Umum Dan Ketenteraman Masyarakat Serta Pelindungan Masyarakat.

2.3.3 Peluang dan Tantangan

Sejak pertama kali dikembangkan menjadi Kota industri, perdagangan, jasa dan alih kapal pada awal tahun 1970an, Kota Batam telah mengalami banyak kemajuan. Pengembangan Kota Batam oleh Pemerintah Pusat tak terlepas dari letak Kota Batam yang berbatasan langsung dengan dua negara tetangga dan daerah-daerah yang menjadi lalu lintas perdagangan internasional, hal ini tentu berimplikasi positif pada posisi geostrategik Kota Batam. Dalam perspektif ekonomi, wilayah Kota Batam menjadi daya tarik bagi negara tetangga untuk berinvestasi dan merelokasi aktivitas ekonomi mereka ke Batam, mulai dari aktivitas industri, perdagangan maupun jasa.

Pengembangan dan kemajuan Kota Batam juga menjadi daya tarik bagi pendatang dari berbagai daerah sehingga menjadikan kota ini kota yang heterogen

dengan multikultur dan menjadi miniatur Indonesia karena hampir semua etnis dan agama terdapat di kota ini yang berdampak kepada meningkatnya jumlah penduduk.

Kondisi ini selain berdampak positif yaitu menambah khasanah kekayaan budaya juga dapat menimbulkan dampak negatif berupa gangguan terhadap keamanan, ketentraman dan ketertiban umum. Jumlah penduduk yang banyak dan heterogen sangat rawan menimbulkan konflik sosial di masyarakat.

Hal ini menjadi tantangan sendiri bagi satpol pp dalam penegakan perda dan penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum di kota batam.

2.3.4 Isu-Isu Strategis Pelayanan Perangkat Daerah

Isu strategis merupakan suatu kondisi yang berpotensi menjadi masalah maupun menjadi peluang suatu daerah dimasa datang. Isu strategis lebih berorientasi pada masa depan. Suatu hal yang belum menjadi masalah saat ini, namun berpotensi akan menjadi masalah daerah pada suatu saat dapat dikategorikan sebagai isu strategis. Selain itu isu strategis juga dapat dimaknai sebagai potensi yang daerah yang belum terkelola, dan jika dikelola secara tepat dapat menjadi potensi modal pembangunan yang signifikan.

Isu-isu strategis harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka menengah/panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah di masa yang akan datang.

Beberapa isu strategis Kota Batam yang tertuang dalam Rencana Strategis RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 adalah:

- a. Adaptasi terhadap Normal Baru pasca wabah Covid-19
- b. Meningkatkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing;
- c. Reformasi Birokrasi;
- d. Mengembangkan wilayah untuk mengurangi kesenjangan dan menjamin pemerataan;
- e. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar;
- f. Membangun lingkungan hidup, meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim;
- g. Mewujudkan Batam sebagai Bandar Berstandar Internasional;
- h. Menciptakan Batam sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi nasional;

- i. Pembangunan gender dan pemberdayaan kelompok difabel dan kelompok rentan;
- j. Peluang Pembiayaan Pembangunan Non APBD.

Dari 10 (sepuluh) isu strategis Kota Batam di atas, akan dipilih isu-isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi Satpol PP. Isu-isu strategis Kota Batam yang relevan dan penting bagi Satpol PP dalam penyelenggaraan ketentraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat adalah:

- a. Mengembangkan SDM yang berkualitas dan berdaya saing

Salah satu mutu pelayanan dasar sub urusan trantibum adalah standar peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan anggota perlindungan masyarakat. Peningkatan kapasitas anggota Satpol PP dan Linmas perlu dilakukan untuk mengembangkan kompetensi dan keahlian agar cakap dalam menghadapi, menangani dan menyelesaikan pelanggaran Perda dan Perkada serta gangguan Trantibum. Dalam hal perlindungan masyarakat (linmas) telah dibentuk Praja Pembina Perlindungan Masyarakat (Prabinmas) dengan program 1 orang anggota Satpol PP ditempatkan untuk 1 kelurahan yang ada di Kota Batam.

- b. Memperkuat infrastruktur untuk mendukung pengembangan ekonomi dan pelayanan dasar.

Dalam 5 (lima) tahun terakhir, Pemerintah Kota Batam sedang giatnya melakukan pembangunan infrastruktur khususnya jalan seluruh wilayah Kota Batam dalam upaya untuk mendukung pengembangan pariwisata. Namun banyaknya lahan yang dikuasai oleh masyarakat tanpa dokumen yang legal serta tidak sesuai dengan rencana tata ruang telah menimbulkan gangguan ketentraman, ketertiban dan keindahan Kota Batam.

Oleh karena itu penataan bahu jalan guna mendukung peningkatan infrastruktur pada jalan-jalan utama dan penertiban Kawasan-kawasan yang tidak sesuai dengan peruntukan terus dilakukan oleh Satpol PP bersama tim terpadu.

- c. Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi ditujukan untuk meningkatkan pelayanan publik yang lebih cepat, lebih murah, lebih mudah dan lebih baik harus selalu diupayakan dan diwujudkan oleh Pemerintah Kota Batam. Isu reformasi birokrasi selalu relevan dalam upaya meningkatkan profesionalitas pemerintah daerah, pola pelaksanaan reformasi birokrasi bersifat iteratif

yang terus menyesuaikan dengan dinamika tuntutan kebutuhan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah yang lebih baik.

Sebagai pemangku urusan pemerintahan bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, Satpol PP harus dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan standar operasional prosedur yang berlaku dan kode etik yang telah ditetapkan.

BAB III

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Didalam usulan Program dan Kegiatan untuk Perubahan Rencana Kerja Tahun Anggaran 2024 Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam mengusulkan Program yang kami katagorikan menjadi 2 (dua) yaitu Program Wajib dan Program Penunjang yaitu :

1. Program Wajib merupakan program yang hasil capaiannya menuju kepada Indikator Kinerja Sasaran yang tertuang didalam Dokumen RENSTRA dan RENJA, terdiri dari 3 (tiga) Kegiatan dan 10 (Sepuluh) Sub Kegiatan.
2. Program Penunjang merupakan program yang hasil capaiannya merupakan pendukung dalam melaksanakan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah terdiri dari 6 (enam) Kegiatan dan 16 (Enam Belas) Sub Kegiatan.

Dalam melaksanakan 2 (dua) program, 9 (Sembilan) kegiatan, dan 26 Sub Kegiatan tersebut Satuan Polisi Pamong Praja kota Batam Mempunyai Pagu Anggaran Sebesar Rp. 50.974.719.439 (Lima Puluh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Empat Juta Tujuh Ratus Sembilan Belas Ribu Empat Ratus Tiga Puluh Sembilan Rupiah) yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Batam Tahun Anggaran 2024.

Perubahan Belanja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.1
Program dan Kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024
Sebelum dan Sesudah Perubahan

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1.	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				100%	100%	54.201.776.783	50.974.719.439	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KETENTRAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT				100%	100%	54.201.776.783	50.974.719.439	
		PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	100%	100%	50.021.217.091	49.446.659.339	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah yang Terpenuhi	100%			30.569.971.499	

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	189 orang /bulan	204 Orang/Bulan	29.160.208.111	30.569.971.499	Karena Adanya penambahan Pegawai PPPK
		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	324 Dokumen	-	60.660.000	0	Karena Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD Digabungkan Ke Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Dan Penyediaan Logistik Kantor
		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah yang Terlaksana	100%	100%	1.344.089.000	952.508.000	-
		Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	2 Paket	2 Paket	1.344.089.000	952.508.000	-
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	100%	100%	760.099.000	155.459.200	-
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1 Paket	1 Paket	17.055.000	2.306.000	-

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	7 Paket	7 Paket	256.006.000	35.377.250	-
		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	3 Paket	2 Paket	269.088.000	32.420.000	-
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	3 Paket	3 Paket	46.194.000	27.671.950	-
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1 Dokumen	1 Dokumen	7.200.000	5.400.000	-
		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	4 Laporan	12 Laporan	164.556.000	52.284.000	Karna Laporan Harus sistematis dan objektif
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Kebutuhan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	744.905.000	166.580.000	
		Pengadaan Mebel	Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Paket	10 Unit	214.090.000	5.790.000	-

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	68 Unit	14 Unit	530.815.000	160.790.000	Adanya Efisiensi Anggaran
		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	100%	100%	18.452.836.172	17.309.970.640	
		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	37 Laporan	12 Laporan	203.160.000	197.142.000	-
		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	72 Laporan	12 Laporan	18.249.676.172	17.112.828.640	Karna Laporan Harus sistematis dan objektif
		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terlaksana	100%	100%	424.172.500	292.170.000	
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	2 Unit	2 Unit	80.760.000	88.280.000	-

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	11 Unit	11 Unit	139.270.000	157.110.000	-
		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	77 Unit	24 Unit	50.370.000	17.180.000	Adanya Efisiensi Anggaran
		Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	2 Unit	2 Unit	153.772.500	29.600.000	Adanya Efisiensi Anggaran
		PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	1 Persentase Gangguan Trantibum yang Dapat Diselesaikan	100%	100%	3.254.607.000	1.528.060.100	
				2 Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100%	100%			
				3 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%			

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	1 Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani	100%	100%	2.432.251.000	1.307.825.700	
				2 Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	100%	100%			
				3 Persentase Polisi Pamongpraja yang Memenuhi Standar Kualifikasi	75%	75%			
				4 Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100%	100%			
				5 Persentase Jenis Sarpras Trantibum yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	100%	100%			

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	5 Dokumen	1 Dokumen	194.252.000	39.398.000	Adanya Efisiensi Anggaran
		Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia	Jumlah SDM Satuan Polisi Pamong praja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya	42 Orang	15 Orang	232.574.000	71.085.700	Adanya Efisiensi Anggaran
		Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	100 Laporan	12 Laporan	410.465.000	180.845.000	Adanya Efisiensi Anggaran
		Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda	54 Laporan	12 Laporan	1.202.750.000	396.750.000	Adanya Efisiensi Anggaran

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan					
		Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani jumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani.	4 Laporan	4 Laporan	50.000.000	25.000.000	Adanya Efisiensi Anggaran
		Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	9 Unit	129 Unit	342.210.000	594.747.000	Karna adanya temuan Binwas, dan kita harus menambah anggaran sarpras Trantibum
		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	100%	100%	726.946.000	188.364.400	
		Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah	11 Laporan	3 Laporan	74.140.000	14.070.000	Adanya Efisiensi Anggaran

NO	URUSAN	PROGRAM/KEGIATAN		INDIKATOR PROGRAM (OUTCOME)/ KEGIATAN (OUTPUT)	TARGET		PAGU		ALASAN PERUBAHAN
		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024		RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	RENJA 2024	PERUBAHAN RENJA 2024	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah sesuai SOP	12 Laporan	12 Laporan	233.256.000	39.034.400	Adanya Efisiensi Anggaran
		Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah	30 Laporan	12 Laporan	419.550.000	135.260.000	Adanya Efisiensi Anggaran
		Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Kabupaten/Kota	Rasio PPNS Kota Batam	6.31%	5.88%	119.168.000	31.870.000	
		Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS	Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan peningkatan kapasitas pejabat PPNS penegak perda	3 Laporan	1 Laporan	95.610.000	31.870.000	Adanya Efisiensi Anggaran
TOTAL							54.201.776.783	50.974.719.438	

Faktor-faktor yang menjadi bahan pertimbangan terhadap rumusan program dan kegiatan Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam tahun 2024 antara lain:

- a. Pencapaian target pada rencana strategis (RENSTRA) satuan polisi pamong praja kota batam tahun 2021-2026.
- b. Pencapaian SPM (standar pelayanan minimal) pada urusan pemerintahan wajib pelayanan dasar bidang ketentraman dan ketertiban umum, yang memiliki fungsi dalam penyelenggaraan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pemeliharaan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, serta perlindungan masyarakat di kota batam.
- c. Menyesuaikan dengan perkiraan pagu anggaran satuan polisi pamong praja kota batam tahun anggaran 2024.
- d. Permasalahan dan isu – isu strategis menyangkut situasi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat kota batam, seperti masih tingginya pelanggaran perda, unjuk rasa dan kerusuhan massa.

3.2 Rencana Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan (Hasil Inputan SIPD RI)

RANCANGAN RENCANA KERJA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH (RENJA OPD) SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KOTA BATAM
TAHUN 2024

NO	KODE	URUSAN/BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		SATUAN POLISI PAMONG PRAJA						50.974.719.439							61.387.383.823	
	1	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR						50.974.719.439							61.387.383.823	
	1.05.	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANGKETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM SERTA PERLINDUNGAN MASYARAKAT						50.974.719.439							61.387.383.823	
	1.05.01	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	Persentase Terpenuhinya Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	100%			100%	49.446.659.339						100%	56.992.661.479	
	1.05.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat yang Terpenuhi	-			100%	30.569.971.499			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam	-	31.924.414.996	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.02.0001	Penyediaan Gaji dan tunjangan ASN														
			Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN				204 Orang/bulan	30.569.971.499	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DANA TRANSFER UMUM-DANA ALOKASI UMUM, DAN TAMBAHAN	-	-	Satuan Plisi Pamong Praja Kota Batam		31.860.754.996,	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
										DUKUKUNGAN PENDANAAN ATAS KEBIJAKAN PEGAWAI PEMERINTAHAN DENGAN PERJANJIAN KERJA						
	01.05.01.2.02.0003	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian Verifikasi Keuangan SKPD														
			Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD				324 Dokumen	0,00	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam		63.660.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Presentase Rata-rata Layanan Administrasi Kepegawaian yang difasilitasi	-			100 %	952.508.000			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		1.251.508.321	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.05.0002	Pengadaan Pakaian Dinas Atribut Kelengkapannya														
			Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan				2 paket	952.508.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		1.251.508.321	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Administrasi Umum Perangkat Daerah	-			100%	155.459.200					Satuan Polisi Pamong Praja Batam		620.510.533	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor														
			Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediaka				1 Paket	2.306.000	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		7.699.461	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediaka				7 Paket	35.377.250	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		142.228.551	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	.05.01.2.06.0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor														
			Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan				2 Paket	32.420.000	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		187.196.285	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0005	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan														
			Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan				2 Paket	27.671.950	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		53.849.164	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan														
			Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediaka				1 Dokumen	5.400.000	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		7.997.420	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.06.0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD														
			Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD				12 Laporan	52.284.000	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		221.539.652	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang Terpenuhi	-			100%	166.580.000		PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-			864.342.562	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang				0 Unit	0,00	Kota Batam,Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		806.916.830	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Disediakan						Semua Kel/Desa							
	1.05.01.2.07.0005	Pengadaan Mebel														
			Jumlah Paket Mebel yang Disediakan				93 Unit	5.790.000,00	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		28.601.632	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.07.0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediaka				14 Unit	160.790.000	Kota Batam, Semua Kecamatan Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		28.824.100	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Kebutuhan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang Terpenuhi	-			100 %	17.309.970.640			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		20.555.489.401	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan				37 Laporan	197.142.000	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		243.921.321	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.08.0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor														
			Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan				72 Laporan	17.112.828.640	Kota Batam, Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		20.311.568.080	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah yang Dipelihara dalam Kondisi Baik	-			100 %	292.170.000			-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		1.776.395.666	
	1.05.01.2.09.0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan														
			Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas				2 Unit	88.280.000,	Kota Batam, Semua Kecamatan,	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		80.760.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya						Semua Kel/Desa							
	1.05.01.2.09.0002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan														
			Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya				11 Unit	157.110.000	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		497.761.665	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya														
			Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara				24 Unit	17.180.000	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		28.624.411	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.01.2.09.0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya														
			Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi				2 Unit	29.600.000	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Satuan Polisi Pamong Praja Batam		1.169.249.901	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02	PROGRAM PENINGKATAN KETENTERAMAN DAN KETERTIBAN UMUM	Persentase Penegakan Perda dan Perkada	100%			100%	1.528.060.100			-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam		4.394.722.344	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Warga Negara Yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	100%			100%									
			Persentase Gangguan Trantibum Yang Dapat	100%			100%									

NO	KODE	URUSAN/BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Diselesaikan													
	1.05.02.2.01	Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Persentase Jenis Sarpras Trantibum yang Terpenuhi Sesuai Kebutuhan	-			100%	1.307.825.700					Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam	-	3.269.675.573	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
			Persentase Pelanggaran dan Pengaduan Trantibum yang Ditangani	-			100%									
			Persentase Polisi Pamongpraja yang Memenuhi Standar Kualifikasi	-			75%									
			Persentase Satlinmas yang Terlatih dan Dikukuhkan	-			100%									
			Persentase Warga Negara yang Memperoleh Layanan Terkena Dampak Gangguan Trantibum Akibat Penegakan Hukum Terhadap Pelanggaran Perda dan Perkada	-			100%									
	1.05.02.2.01.0003	Koordinasi Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Tingkat Kabupaten/Kota														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Koordinasi Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tingkat				0 Dokumen	0,00	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam		53.690.682	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA

NO	KODE	URUSAN/BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Kabupaten/Kota													
	1.05.02.2.01.0004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum				1 Dokumen	39.398.000	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam		148.581.847	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0005	Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat Termasuk dalam Pelaksanaan Tugas yang Bernuansa Hak Asasi Manusia														
			Jumlah SDM Satuan Polisi Pamongpraja dan Satuan Perlindungan Masyarakat yang Ditingkatkan Kapasitasnya				15 Orang	71.085.700	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam		281.733.291	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0006	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan dan Penanganan Gangguan Ketentraman dan Ketertiban Umum														
			Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Teknik Pencegahan Kejahatan				0 Dokumen	0,00	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam		53.690.682	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0008	Penyusunan SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat														
			Jumlah Dokumen SOP Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang Telah Dibuat dan Dimutakhirkan				0 Dokumen	0,00	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam		60.000.000	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan														
			Jumlah Laporan Gangguan				12 Laporan	180.845.000	Kota Batam,Semua	PENDAPATAN ASLI DAERAH	-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol		163.939.128	SATUAN POLISI PAMONG

NO	KODE	URUSAN/BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan						Kecamatan, Semua Kel/Desa	(PAD)			PP Kota Batam			PRAJA
	1.05.02.2.01.0016	Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa														
			Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan				12 Laporan	396.750.000,	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam		1.004.982.186	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0017	Penyediaan Layanan dasar dalam rangka Dampak Penegakan Peraturan Daerah dan Perturan kepala daerah														
			Jumlah Laporan Penyediaan Layanan Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayaniumlah Laporan pemberian pelayanan dasar kepada warga Layanan yang ter Dampak Penegakan Perda dan Perkada yang Terlayani				4 Laporan	25.000.000,	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam		53.690.682	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.01.0018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum														

NO	KODE	URUSAN/BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
			Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia				129 Unit	594.747.000	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam		1.449.367.075	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02	Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti	-			100 %	188.364.400			-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam		997.082.547	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0010	Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Sosialisasi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				3 Laporan	14.070.000,	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam		71.387.131	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0011	Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah														
			Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP				12 Laporan	39.260.000	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD), DBH CUKAI HASIL TEMBAKAU (CHT)	-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam		244.442.937	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.02.0012	Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah														
			Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah				12 Laporan	135.260.000	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	-	-	Masyarakat Kota Batam, Satpol PP Kota Batam		681.252.479	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03	Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil	Rasio PPNS Satpol PP				5.88%	31.870.000,					Satuan Polisi Pamong Praja Kota		127.967.224	SATUAN POLISI

NO	KODE	URUSAN/BIDANG /PROGRAM / KEGIATAN / SUB KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM/KEGIATAN/ SUB KEGIATAN	TARGET AKHIR RENSTRA OPD	REALISASI CAPAIAN RENJA OPD TAHUN 2022	PRAKIRAAN CAPAIAN TARGET RENJA OPD TAHUN 2023	CAPAIAN KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN						KELOMPOK SASARAN	PRAKIRAAN MAJU RENCANA TAHUN 2025		PERANGKAT DAERAH PENANGGUNG JAWAB
							TARGET 2024	PAGU INDIKATIF (Rp)	LOKASI	SUMBER DANA	PRIORITAS			TARGET	PAGU INDIKATIF (Rp)	
											NASIONAL	DAERAH				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
		(PPNS) Kabupaten/Kota											Batam			PAMONG PRAJA
	1.05.02.2.03.0006	Pengembangan Kapasitas dan Karier PPNS														
			Jumlah Laporan Hasil Pengembangan dan Peningkatan Kapasitas Pejabat PPNS Penegak Perda				1 Laporan	31.870.000	Kota Batam,Semua Kecamatan, Semua Kel/Desa	PENDAPATAN ASLI DAERAH (PAD)	--	-	Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam		127.964.224	SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
		JUMLAH						50.974.719.438							61.387.383.823	

BAB IV

PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disingkat RKA Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Oleh karena itu pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam APBD, sehingga apabila di kemudian hari terjadi defisit anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian target kinerja dengan kemampuan anggaran yang ada.

Perubahan Renja Tahun 2024 ini hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.

BAB IV PENUTUP

Perubahan Rencana Kerja (Renja) Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam Tahun 2024 ini merupakan dokumen rencana yang memuat program dan kegiatan yang diperlukan untuk mencapai sasaran pembangunan yang tertuang dalam Renstra dan RPJMD Kota Batam Tahun 2021-2026 yang selanjutnya dituangkan dalam Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang disingkat RKA Perangkat Daerah, yaitu dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.

Oleh karena itu pencapaian target kinerja yang tertuang dalam Perubahan Renja Tahun 2024 ini sangat bergantung pada ketersediaan anggaran Pemerintah Kota Batam yang tertuang dalam APBD, sehingga apabila di kemudian hari terjadi defisit anggaran, maka akan dilakukan penyesuaian target kinerja dengan kemampuan anggaran yang ada.

Perubahan Renja Tahun 2024 ini hendaknya menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Satuan Polisi Pamong Praja Kota Batam dalam melaksanakan tugas-tugas pemerintahan di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat sesuai dengan program dan kegiatan yang telah ditetapkan.

Demikian Perubahan Rencana Kerja (Renja) Tahun 2024 ini disusun untuk dijadikan pedoman dalam penyusunan RKA Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2024.

WALI KOTA BATAM


MUHAMMAD RUDI